

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan negara yang begitu luas dan juga memiliki banyak hubungan kerjasama dengan berbagai negara di dunia, hubungan bilateral maupun hubungan multilateral. Dengan banyaknya hubungan kerjasama yang terjalin antar negara, memungkinkan Indonesia memiliki hambatan dan juga tantangan dalam mencapai tujuan yaitu untuk kepentingan nasionalnya. Negara-negara yang memiliki letak geografis dengan Indonesia lebih aktif dalam menjalin hubungan kerjasama agar tidak terjadinya konflik antar negara.

Malaysia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki hubungan baik dengan Indonesia. Letak geografis antara Indonesia dan Malaysia pun sangat dekat. Hal ini juga menjadi salah satu pemicu banyak persamaan sejarah dari kedua negara, keragaman kebudayaan, serta adanya kekerabatan yang erat antara kedua negara.

Banyaknya imigran Indonesia yang berada di Malaysia membuat kedua negara ini pun membentuk hubungan kerjasama yang cukup luas, mulai dari bidang ekonomi, bidang politik, bidang pendidikan, bidang ketenagakerjaan, serta kerjasama yang berhubungan dengan adanya kepentingan nasional dari masing-masing negara. Dari adanya kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Malaysia tentu memberikan keuntungan untuk masing-masing negaranya, walaupun kerjasama ini sering mengalami tantangan untuk meningkatkan hubungan kerjasama yang strategis (Effendi T. D., 2013).

Kerjasama yang telah terjalin antar kedua negara ini yang menjadi media untuk para tenaga kerja dari Indonesia maupun Malaysia dalam memperbaiki perekonomian mereka dan juga mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Malaysia yang saat ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang meningkat, membutuhkan tenaga kerja tambahan untuk bekerja di berbagai sektor industri. Hal ini tidak terpenuhi oleh tenaga kerja dalam negeri yang dimiliki. Maka dari itu, Malaysia membuka lapangan pekerjaan bagi para tenaga kerja asing dari berbagai negara. Sehingga banyak Warga Negara Indonesia berminat dan melakukan migrasi untuk memperbaiki perekonomian dan juga mendapatkan kehidupan yang lebih baik di Malaysia.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ialah salah satu sasaran untuk proses perkembangan ekonomi negara mereka. Bagi pemerintah Indonesia, arus TKI ke luar negeri merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan pengangguran dan bentuk kontribusi dalam pemasukan devisa negara. Namun, para negara industri membutuhkan keterampilan dan juga tenaga dari para tenaga kerja yang akan dipilih.

Dalam UU Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 1, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Terdapat mekanisme dalam penempatan TKI seperti pra penempatan TKI, perekrutan dan seleksi, pendidikan dan pelatihan kerja, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, pengurusan dokumen, perjanjian kerja, masa tunggu di penampungan, dan masa penempatan. Dalam proses perekrutan dan penempatan akan melibatkan berbagai instansi seperti Kementerian Tenaga Kerja, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, serta Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia.

Kemenaker, BNP2TKI, dan PJTKI terlibat dalam proses perekrutan hingga penempatan calon TKI secara resmi.

Terdapat proses yang panjang bagi para calon TKI untuk mendapatkan penempatan pekerjaan sehingga terbentuknya warga Indonesia yang bermigrasi ke Malaysia terbagi dalam 2 jenis, yaitu TKI legal dan TKI ilegal. Dapat disebut TKI legal jika TKI tersebut memiliki dokumen-dokumen resmi dan mengikuti prosedur imigrasi dari negara. Sedangkan TKI ilegal sering didefinisikan sebagai orang-orang yang melakukan perpindahan atau migrasi yang terjadi tidak sesuai prosedur dan aturan dari negara. Para TKI ilegal tersebut tidak memiliki dokumen-dokumen resmi yang dibutuhkan sesuai peraturan imigrasi.

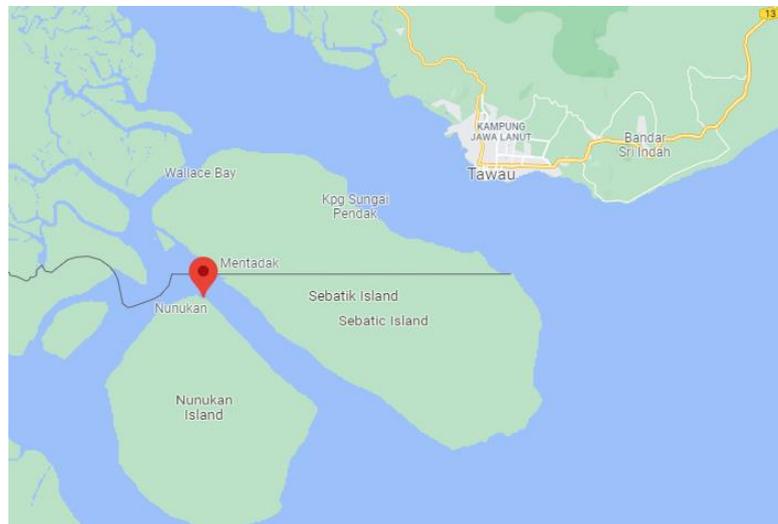
Dalam data BNP2TKI, penempatan TKI di Malaysia yang mencapai kurang lebih 511.000 jiwa pada tahun 2014 hingga awal 2019 (BNP2TKI, 2019). Jumlah tersebut belum termasuk keluarga dan TKI ilegal yang bisa lebih dari jumlah tersebut. Adapun data dari Kementerian Sumber Manusia Malaysia tahun 2016 bahwa TKI merupakan jumlah tenaga kerja terbesar sebanyak 786.314 orang (KSM, 2021). Kementerian Sumber Manusia Malaysia di menyebutkan bahwa data TKI di atas yang masuk ke Malaysia yang memenuhi prosedur *Momerandum of Understanding* (MoU) atau Nota Kesepahaman belum termasuk TKI ilegal yang berada di Malaysia.

No.	Tahun	Penempatan TKI di Malaysia
1	2014	127.870
2	2015	97.748
3	2016	87.623
4	2017	88.991
5	2018	90.671

6	2019	19.695
---	------	--------

**Tabel 1: Data Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia dari tahun 2014-2019**

Dapat dilihat dari data-data di atas, bahwa banyak dari TKI yang memilih mencari pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan di Malaysia meskipun tidak sedikit pula yang tidak memenuhi prosedural *Momerandum of Understanding* (MoU) yang dikategorikan sebagai TKI ilegal. Sabah merupakan daerah yang menerima kedatangan TKI paling banyak. Salah satu daerah di Sabah yang menjadi pusat perhatian untuk para TKI ilegal adalah Tawau. Secara letak geografis, Tawau merupakan salah satu daerah yang sangat dekat dengan Indonesia, khususnya daerah Kalimantan dan Sulawesi. Penduduk daerah Tawau terdiri dari suku Melayu, Bugis, Vhina, Banjar, Tidung, Suluk, Bajau, Buton, Kadazan, Bolongan, Arab, India, dan



**Gambar 1: Peta Perbatasan Nunukan - Tawau**

lain sebagainya (Tawau K. , 2014).

Kontributor utama pertumbuhan penduduk di Tawau yaitu Indonesia dan Filipina. Pertumbuhan ekonomi di Tawau yang bertumbuh pesat menyebabkan banyak membutuhkan tenaga kerja asing dikarenakan Tawau kekurangan tenaga kerja dalam sektor pertanian serta perindustrian. Julukan yang diberikan kepada Tawau yaitu ‘Bumi Peladang’, dimana sebagian besar dari wilayah Tawau merupakan kawasan perladangan, seperti ladang kelapa sawit yang hampir keseluruhan dimiliki oleh *Government Link Company (GLC)* seperti *Felda*, *Sime Darby Corporation*, *Sabah Softwood Sdn Bhd*, dan *Borneo Samudera (Sawit)* (Tawau K. , 2014). Selain perkebunan sawit, ada perkebunan kakao, kayu, perdagangan, perikanan, pelabuhan ekspor-impor, pelabuhan ferry/penumpang, dan pelabuhan “*Barter Trade*” yang menjadi pendukung kemajuan daerah Tawau.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan sektor yang dapat memberikan sumbangan devisa yang cukup besar untuk Indonesia. Namun adapun pengaruh negatif yang ditimbulkan yaitu narkoba yang tersebar luas dan meningkatnya jumlah TKI ilegal serta hadir banyak permasalahan TKI seperti pemicu adanya kekerasan, deportasi, eksploitasi, dan lain sebagainya (Berawi & Nasser, 2014). Berdasarkan peraturan ketenagakerjaan asing, dari pihak Malaysia memiliki larangan tenaga kerja asing legal maupun ilegal untuk membawa keluarga mereka tinggal dan menetap hingga memiliki keturunan, dikhawatirkan akan hidup dalam kondisi terbatas dan mendatangkan masalah baru tentang anak-anak TKI di Malaysia.

Tidak sedikit dari TKI menetap dan memiliki keturunan, dan sebagian besar dari mereka tidak melaporkan pernikahan dan kelahiran mereka secara resmi kepada Konsulat RI di Tawau. Dengan begitu sulit bagi anak-anak TKI ilegal untuk mendapatkan kartu identitas, kewarganegaraan, dan pendidikan. Terdapat banyak anak-anak TKI ilegal menjalani hidup mengikuti jejak orangtua mereka sebagai

nelayan, pekerja ladang, ataupun pedagang. Sehingga membuat mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan membuat mereka kekurangan ilmu pengetahuan dan rasa nasionalisme mengenai negara asal mereka.

Pendidikan adalah proses dalam kehidupan untuk dapat melangsungkan kehidupan dan setiap manusia berhak mendapatkannya. Dengan begitu tentu Indonesia akan lebih mudah mencapai kepentingan nasional negaranya salah satunya untuk mencerdaskan generasi bangsa yang akan mendatang (Christie, 2016). Namun, tidak untuk anak-anak TKI ilegal yang tidak memiliki dokumen-dokumen resmi dan memiliki tuntutan perekonomian keluarga.

Indonesia dan Malaysia sudah bekerjasama sejak tahun 1970-an dalam berbagai bidang, salah satunya adalah bidang pendidikan. Memberikan fasilitas pendidikan terhadap anak-anak Indonesia yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Indonesia melakukan kerjasama ini karena Indonesia sadar akan pentingnya sebuah pendidikan (Andita, Damayanti, & Suryo, 2016).

Pada awalnya, perhatian pemerintah Indonesia hanya terfokus di wilayah Kota Kinabalu saja, sehingga menyebabkan terjadinya ketidakmerataan di wilayah lainnya, seperti di Tawau. Sehingga pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan perhatiannya pada pendidikan anak-anak di Tawau dikarenakan masih banyak anak-anak TKI yang tinggal di ladang perkebunan sawit, perkebunan teh, dan pabrik-pabrik dengan tidak memiliki dokumen-dokumen resmi atau yang dikenal dengan *undocumented*.

Selain itu, sekolah-sekolah di Tawau masih ada yang menggunakan kurikulum Malaysia, sehingga beberapa dari anak-anak TKI tidak mengetahui sejarah Indonesia dan juga lagu kebangsaann Indonesia. Tentu ini menjadi salah satu keprihatinan untuk

kemajuan bangsa Indonesia di mana yang kita ketahui bahwa anak-anak adalah masa depan bangsa. Adapun sikap orang tua yang masih belum menyadari akan pentingnya pendidikan untuk anak-anak mereka sehingga tidak peduli akan hak anak-anak mereka untuk mendapatkan pendidikan.

Hal ini tentu tidak dapat diselesaikan oleh anak-anak TKI serta orangtuanya, namun dengan adanya pemerintah Indonesia bekerjasama dengan pemerintah Malaysia dalam menangani persoalan yang telah terjadi ini. Pemerintah melakukan pengiriman guru-guru terpilih sebagai tenaga pendidik untuk anak-anak TKI di Tawau agar hak pendidikan mereka dapat terpenuhi khususnya mereka yang sangat susah untuk mendapatkan akses pendidikan.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut: “Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menangani pendidikan untuk anak-anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Tawau, Sabah, Malaysia?”

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan apa saja yang telah pemerintah Indonesia lakukan untuk menangani permasalahan pendidikan anak-anak TKI di Tawau, Sabah, Malaysia
2. Menambah ilmu tentang diplomasi, kebijakan luar negeri Indonesia dan Malaysia, dan juga permasalahan pendidikan anak-anak TKI yang berada di negara lain.

## **D. KERANGKA TEORI**

Dalam menganalisis penelitian mengenai “Kebijakan Pemerintah RI dalam Mengatasi Permasalahan Pendidikan Anak-Anak TKI di Tawau, Sabah, Malaysia 2015-2019”, maka penulis akan menggunakan teori dan konsep dalam hubungan internasional sebagai berikut:

### **1. Kerjasama Internasional**

Menurut Dougherty dan Pfaltzgraff, kerjasama merupakan hubungan-hubungan yang tidak dilakukan dengan paksaan maupun kekerasan dan juga sah secara hukum, seperti PBB ataupun Uni Eropa. Aktor-aktor yang terlibat tidak hanya negara, namun adanya organisasi internasional dan rezim internasional yang menjembatani dalam prosedur pengambilan keputusan, regulasi, norma, dan seperangkat aturan yang dimana menjadi harapan untuk para aktor dan kepentingan sebuah negara atau lebih dapat bertemu dalam lingkup internasional (Dougherty & Pfaltzgraff, 1997). Kerjasama yang terjalin antara negara satu dengan yang lainnya memiliki beberapa alasan, yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi negara, mengatasi berbagai macam masalah-masalah yang mengganggu atau mengancam keamanan masing-masing negara, mengurangi adanya kerugian yang dapat merugikan atau memberi dampak kepada negara lainnya (Holsty, *International Politics : A Framework For Analisis*, 1995).

Menurut K.J Holsti, kerja sama internasional terdapat dalam 5 aspek. Pertama, pandangan bahwa banyaknya kepentingan, tujuan yang menghasilkan sesuatu dari sebuah pertemuan, dan semua pihak dapat memenuhi tujuan mereka (Holsty, 1988). Kedua, harapan atau pandangan dari suatu negara kepada negara lainnya yang memiliki kebijakan untuk membantu negara tersebut untuk mencapai kepentingan serta nilai-nilai. Ketiga, terdapat persetujuan semua negara yang memiliki masalah-

masalah tertentu untuk melakukan atau memanfaatkan persamaan kepentingan semua pihak. Keempat, aturan resmi dan tidak resmi dalam transaksi di masa yang akan datang dilakukan untuk persetujuan yang terlaksanakan. Kelima, transaksi antarnegara dalam memenuhi persetujuan mereka.

Kerjasama Internasional atau antarbangsa adalah kerjasama antara dua atau lebih negara yang merdeka dan berdaulat untuk menjaga kepentingan negaranya dalam dunia internasional agar mencapai tujuan masing-masing negaranya (Supriyanto, 2014). Kerjasama Internasional memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan negara satu dengan yang lainnya, dapat mencegah atau dapat mengatasi konflik yang akan atau yang telah terjadi, dapat menjadi suatu pengakuan bahwa negara tersebut adalah negara yang merdeka, dsb.

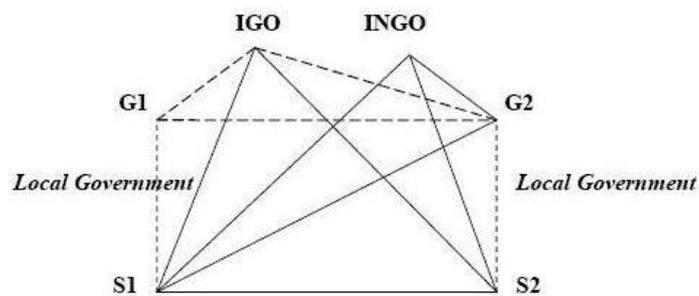
Seperti yang telah dijelaskan konsep Kerjasama Internasional di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Indonesia dan Malaysia melakukan kerjasama internasional untuk saling menguntungkan. Salah satunya Indonesia dan Malaysia bekerjasama dalam bidang pendidikan anak-anak TKI di Tawau, Sabah. Dengan pendekatan kerjasama Internasional, pemerintah Indonesia dan Malaysia dapat bekerjasama dalam menangani permasalahan TKI Ilegal sehingga dapat mempermudah proses untuk anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan seharusnya didapatkan.

## **2. Transnational Social Protection (TSP)**

Transnasional dalam hubungan internasional diciptakan untuk menegaskan bahwa hubungan internasional tidak memiliki batas pada pemerintah. Tidak hanya negara, aktor dalam transnasional juga antara lain: gerakan sosial lokal, media massa, yayasan, perserikatan perdagangan atau organisasi konsumen, *intergovernmental and organization* (IGO) regional maupun internasional,

*international non-government organization* (INGO), dan *non-governmental organization* (NGO) (Hanulaza & Khoirino, 2015).

Menurut Peggy Levitt, Jocelyn Viterna, Armin Mueller, dan Charlotte Lloyd, transnasional didefinisikan sebagai kebijakan, program, orang, organisasi, dan lembaga-lembaga yang menyediakan dan melindungi individu-individu di berbagai bidang (Levitt, Viterna, Mueller, & Lloyd, 2017). Fokus utamanya adalah perlindungan sosial untuk individu yang bergerak secara sukarela, tidak hanya para imigran, non imigran dan pengungsi pun mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program ini. Mereka menyebutkan bahwa masyarakat suatu negara dapat berhubungan langsung dengan masyarakat dari negara lain dan organisasi pemerintah maupun non pemerintah dapat melakukan hubungan langsung dengan masyarakat suatu negara melalui pemerintah pusat. Interaksi transnasional dapat dipahami melalui gambar sebagai berikut (Keohane & Jr, 1971):



**Gambar 2: Pola Hubungan Transnasional**

**Keterangan:**

- ..... : Politik dalam negeri
- : Politik antar negara
- \_\_\_\_\_ : Interaksi transnasional
- G : Government ( Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia)
- S : Society (anak-anak TKI)
- IGO : Intern Government Organization
- INGO : Intern Non Government Organization

Pada gambar di atas merupakan pola hubungan transnasional yang dimana pemerintah pusat disimbolkan sebagai (G), anak-anak TKI disimbolkan sebagai (S). Pemerintah Indonesia dan Malaysia menjalin hubungan kerja sama dalam memberikan pendidikan anak-anak TKI, dan juga adanya aktor non pemerintah serta aktor-aktor lainnya yang bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Malaysia.

Imigran seringkali terabaikan oleh negara yang menjadi tuan rumahnya di mana negara tersebut tidak memperhatikan bagaimana imigran dapat melindungi diri mereka khususnya yang berada di daerah perbatasan. Banyak pekerjaan yang hanya fokus pada perlindungan transnasional perkerja domestik, tidak dengan para pekerja imigran. Dalam hal ini, transnasional telah diberlakukan untuk melindungi pekerja imigran yang seringkali lebih rentan terhadap ekonomi dan pelecehan fisik daripada pekerja domestik.

Tidak hanya dalam masalah tenaga kerja imigran, *Transnational Social Protection* (TSP) atau perlindungan sosial transnasional dalam bidang pendidikan sering berkembang terhadap populasi imigran yang banyak dari suatu negara yang menetap di negara lain. Kedua negara tersebut tentu memiliki sistem pendidikan yang berbeda yang menjadikan alasan munculnya gerakan-gerakan sosial domestik maupun internasional yang terlibat dalam penanganan pendidikan terhadap para anak-anak imigran yang berada di negara lain (Levitt, Viterna, Mueller, & Lloyd, 2017).

Para anak-anak TKI yang berada di Malaysia mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Terbatasnya pendidikan anak-anak TKI di Tawau, Sabah, menjadi salah satu peluang untuk mencapai suatu kepentingan para

organisasi tertentu baik nasional maupun internasional. Indonesia melakukan kerjasama terhadap Malaysia agar dapat lebih mudah dalam menangani permasalahan tersebut.

Ada beberapa lembaga pendidikan swasta yang memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak TKI di Sabah. Salah satunya ialah LSM *Humana Child Aid Society*. LSM *Humana Child Aid Society* berasal dari Denmark yang bergerak dalam bidang pendidikan di bawah koordinasi *Borneo Child Aid Society*. Sejak tahun 1991, *Humana Child Aid Society* telah memberikan fasilitas atau layanan pendidikan terhadap anak-anak pekerja imigran yang ada di Sabah. Selain *Humana Child Aid Society*, adapun *Community Learning Center* yang dibentuk untuk membantu permasalahan pendidikan anak-anak TKI di Tawau, Sabah, Malaysia. Lembaga-lembaga tersebut menjadi IGO dan INGO sebagai jembatan anakanak TKI ilegal di Tawau untuk mendapatkan hak pendidikan mereka.

## **E. HIPOTESA**

Berdasarkan kerangka teori di atas, dapat kita ketahui beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam menangani pendidikan untuk anak-anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Tawau, Sabah. Maka penulis bisa mengambil hipotesa:

1. Indonesia menyelesaikan permasalahan legalitas Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Sabah, Malaysia khususnya Tawau agar anak-anak TKI ilegal mendapatkan pendidikan yang sama dan layak.
2. Indonesia melakukan kerjasama dengan NGO dan membentuk tempat kegiatan belajar-mengajar untuk anak-anak TKI.

## **F. JANGKAUAN PENELITIAN**

Pada penelitian ini, penulis berfokus pada data antara tahun 2014-2019 dengan alasan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2014, sekitar 25.000 lebih anak-anak TKI di Tawau yang tercatat dalam database KJRI Tawau dan belum mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak.
2. Pada tahun 2019, Indonesia bekerjasama dengan Malaysia dan juga lembaga-lembaga non pemerintah dengan mendirikan sekolah-sekolah sekitar 58 sekolah untuk anak-anak TKI di Tawau, Sabah, Malaysia.

## **G. METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut John W. Creswell, penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan (Bakry, 2016). Menurut Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln penelitian kualitatif mencakup penelitian dan pengumpulan berbagai macam material empiris seperti studi kasus, pengalaman personal (personal experience), introspektif, cerita hidup (life story), wawancara, observasional, sejarah, interaksional, dan teks-teks visual yang menggambarkan kejadian rutin dan problematis yang bermakna dalam pengalaman individu. Pendekatan yang digunakan Dalam penelitian ini kemudian dari pengumpulan data-data penelitian rilis resmi pemerintah, jurnal, buku, laporan penelitian, berita, *working paper*, dan observasi berupa kunjungan lapangan KKN di Bombalai, Tawau, Sabah, Malaysia. Penelitian ini berisi deskripsi dari Upaya

Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Permasalahan Pendidikan Anak-Anak TKI di Tawau.

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dijabarkan menjadi tiga bab, dengan berbagai sub bab topik pembahasan sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang ulasan pemahaman yang menerangkan berbagai penjelasan mengenai subjek-subjek penelitian, yang dibagi dalam sub mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN PENDIDIKAN ANAK-ANAK TKI DI TAWAU SABAH MALAYSIA**

Bab ini berisi tentang permasalahan yang dialami oleh anak-anak TKI di Tawau, Sabah, Malaysia serta permasalahan pendidikan anak TKI di Tawau. Berisi upaya pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam mengatasi permasalahan pendidikan anak-anak TKI di Tawau Sabah Malaysia. Menjelaskan program pendidikan yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk anak TKI di Tawau. Adapun dijelaskan hambatan-hambatan yang terjadi selama/sebelum berjalannya program pendidikan pemerintah Indonesia. Bab ini dikaitkan dengan teori yang berlaku.

### **BAB III: KESIMPULAN**

Bab ini menjadi penutup yang menjelaskan mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah dianalisis dari bab sebelumnya.